

Tingkat Kesesuaian Sustainability Report 2023 Perusahaan Pembiayaan Di BEI Terhadap POJK Nomor 51/POJK.03/2017

Rossi Armando

Akuntansi Sektor Publik Sarjana Terapan, Politeknik Keuangan Negara STAN,
Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15222, Indonesia

Email : 4131220233_rossi@pknstan.ac.id



Abstract

Purpose: This study aims to analyze the level of conformity of the 2023 sustainability reports issued by financing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the regulations stipulated in POJK No. 51/POJK.03/2017.

Design/methodology/approach: The research adopts a qualitative descriptive approach using a scoring method for each reporting element. The sample consists of 14 financing companies listed on the IDX. The assessment is based on the eight-element criteria specified in POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

Findings: The results indicate that all financing sector companies listed on the IDX show a relatively good level of conformity with the regulation in disclosing their sustainability reports. These findings provide useful insights into the implementation of the regulation, which requires sustainability reports to be mandatory for all companies. However, some companies have not fully disclosed all required elements, particularly in the sections of sustainability performance overview and independent third-party verification.

Research limitations/implications: This study is expected to serve as an evaluation reference for the government, through the Financial Services Authority (OJK), in supervising and ensuring that the sustainability reports produced by companies comply with the existing regulations.

Keywords

*Sustainability Report;
Sustainable Finance;
Elements;
Conformity;
Financing Companies;
Indonesia Stock Exchange.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi dalam praktik keberlanjutan dan keuangan hijau, khususnya dalam sektor financing. Praktik keberlanjutan dan keuangan hijau yang dilakukan ini sejalan dengan komitmen global dalam rangka mencapai *Net Zero Emission* 2060. Menurut *Center for Strategic and International Studies* atau CSIS (2024), perusahaan pembiayaan di Indonesia harus meningkatkan operasi bisnis dengan cara mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hal ini sejalan dengan hasil dari dialog terbuka di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 oleh *Green Investment Principle* (GIP) ASEAN Chapter mengenai Pembiayaan Hijau atau *Green Financing*.

Penerapan *Green Financing* di Indonesia sendiri sudah berjalan cukup lama dibuktikan dengan penetapan regulasi mengenai Laporan Keberlanjutan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Pemerintah Indonesia

melalui OJK telah mengeluarkan regulasi, yaitu POJK No. 51 tahun 2017 yang mengatur tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Meskipun peraturan tersebut telah dikeluarkan sejak lama, tingkat kualitas, kesesuaian, dan konsistensi pelaporan keberlanjutan pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI masih bervariasi dan masih terdapat yang belum memenuhi standar yang berlaku.

Melihat dari sudut pandang pengguna laporan, Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* menjadi salah satu laporan yang penting karena memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Laporan ini juga tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan semata, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan khususnya pada perusahaan pembiayaan terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, adanya Laporan Keberlanjutan yang memuat informasi keuangan dan non keuangan ini juga dapat mempermudah pengguna laporan dalam mengambil keputusan. Menurut Amalia *et al.* (2022), laporan keberlanjutan atau lebih tepatnya mengenai akuntansi keberlanjutan mempunyai tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan internal maupun eksternal dalam merumuskan kebijakan baru yang akan memberikan dampak pada kinerja perusahaan dalam bidang sosial, ekologi, dan ekonomi. Oleh karena itu, Laporan Keberlanjutan menjadi sangat penting untuk disusun dan disajikan secara tepat, serta sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Hal ini tentu saja untuk memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan tersebut disajikan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan relevansi informasi bagi para pengguna laporan. Dasar pemikiran tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisis mengenai tingkat kesesuaian sustainability report tahun 2023 pada perusahaan sektor pembiayaan yang terdaftar di BEI terhadap POJK No. 51 tahun 2017.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat sehingga aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat luas (Siladjaja *et al.*, 2023). Dalam konteks laporan keberlanjutan, perusahaan menggunakan laporan ini untuk menunjukkan dan meyakinkan ke masyarakat bahwa operasional perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan peraturan POJK No. 51 tahun 2017 dapat dilihat dari sisi teori legitimasi dalam hal menjaga hubungan dengan publik dan regulator melalui transparansi informasi. Semakin tinggi tingkat kesesuaian laporan keberlanjutan terhadap regulasi, semakin besar kemungkinan perusahaan dianggap bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

2.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder teori yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat maupun terdampak dalam kegiatan dan kinerja perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan (Freeman, 2010). Menurut Susadi & Kholmi (2021), perusahaan tidak hanya sekedar mencapai tujuan atau kepentingan pribadinya, tetapi harus memiliki kontribusi yang baik kepada semua pemangku kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, laporan keberlanjutan menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Pengungkapan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan regulasi dapat diartikan bahwa perusahaan telah berupaya memenuhi hak informasi para pemangku kepentingan. Selain itu dengan laporan keberlanjutan yang mengungkapkan seluruh informasi yang penting ke pemangku kepentingan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

2.3 Teori Signaling

Teori signaling menjelaskan mengenai perusahaan yang dapat mengirimkan sinyal kepada pihak luar melalui tindakan atau informasi berupa laporan dalam rangka menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pengungkapan laporan keberlanjutan ini menjadi salah satu cara perusahaan memberikan sinyal kepada investor mengenai informasi bahwa perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk

melakukan kegiatan usaha yang memiliki hubungan langsung dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk mencapai tujuan jangka Panjang (Farhana & Adelina, 2019). Bagi perusahaan pembiayaan, hal ini sangat relevan karena sebagai perusahaan yang mendukung green financing diperlukan informasi yang selaras antara perusahaan dan investor mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan yang dilakukan.

2.4 Sustainability Report

Sustainability Reporting atau Laporan Keberlanjutan berdasarkan Global Reporting Initiative adalah sebuah proses yang digunakan oleh perusahaan dalam menetapkan sebuah tujuan, pengukuran kinerja, dan pengelolaan dalam rangka menuju perusahaan ekonomi global yang berkelanjutan (Fuadah *et al.*, 2018). Laporan Keberlanjutan menekankan pada penggabungan antara profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang dengan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Laporan ini menjadi salah satu laporan yang penting bagi para pemangku kepentingan karena mencakup informasi-informasi, seperti kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Dewi & Pitriasari, 2019).

2.5 Tujuan dan Manfaat Sustainability Report

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Widodo (2019), *Sustainability Report* memberikan banyak sekali manfaat berupa pemberian informasi-informasi penting kepada stakeholder dan memiliki peran dalam peningkatan prospek perusahaan dimasa depan. Laporan ini juga membantu dalam rangka perwujudan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keberlanjutan yang baik di lingkungan perusahaan. Menurut Pratami (2019), *Sustainability report* juga mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Laporan keberlanjutan ini diharapkan dapat membangun reputasi perusahaan yang baik karena dapat meningkatkan loyalitas dan pangsa pasar. Adanya pelaporan keberlanjutan ini, terjadi peningkatan terhadap pengelolaan risiko perusahaan dan dapat membantu pengembangan sistem manajemen dalam rangka menangani dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi di masa yang akan datang.

2.6 Standar Sustainability Report

Global Reporting Index (GRI) Standards adalah standar atau pedoman lingkup internasional yang dalam pelaporan dampak, lingkungan, sosial, dan ekonomi kepada pengguna yang diterbitkan oleh GRI (Munandar *et al.*, 2021). *Sustainability Report* sendiri harus disusun berdasarkan GRI Standards sehingga pengguna laporan dapat dengan jelas mengetahui informasi terkait kontribusi atau dampak positif maupun negatif perusahaan dalam rangka pembangunan keberlanjutan (Setiani & Sinaga, 2021). Namun, di Indonesia sendiri melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan petunjuk teknis untuk perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah terkait format penyusunan Laporan Keberlanjutan. Petunjuk teknis dan format penyusunan Laporan Keberlanjutan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017.

2.7 POJK No. 51/POJK.03/2017

POJK No. 51/POJK.03/2017 merupakan peraturan yang mengatur mengenai kewajiban lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk dapat menerapkan keuangan keberlanjutan yang dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik, 2017). Dalam penerapannya, OJK mengatur untuk setiap lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk dapat berkontribusi dalam program keberlanjutan dengan cara pembuatan berupa produk atau jasa keuangan berkelanjutan, rencana aksi keuangan berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. OJK sendiri mewajibkan agar setiap perusahaan dapat membuat laporan keberlanjutan secara berkala mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2025 sesuai dengan format pada lampiran II POJK No. 51/POJK.03/2017. Tujuan utama dari peraturan ini yaitu untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan cara mewajibkan seluruh perusahaan untuk dapat menyusun Laporan Keberlanjutan.

2.8 Format Laporan Keberlanjutan Sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017

Format Laporan Keberlanjutan diatur dalam Lampiran II POJK No. 51/POJK.03/2017. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap perusahaan harus menyusun Laporan Keberlanjutan dengan paling sedikit

memuat enam elemen wajib ditambah dengan 1 elemen. Namun, merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2024, isi dari Laporan Keberlanjutan paling tidak memuat 6 elemen wajib ditambah dengan 2 elemen tambahan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Berikut merupakan isi yang harus dimuat dalam Laporan Keberlanjutan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh OJK.

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan
3. Profil Singkat
4. Penjelasan Direksi
5. Tata Kelola Keberlanjutan
6. Kinerja Keberlanjutan
7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)
8. Lembar Umpan Balik untuk Pembaca (jika ada)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis isi pada dokumen Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti menilai tingkat kesesuaian laporan yang diterbitkan oleh perusahaan dengan peraturan atau standar yang ada. Penilaian yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada elemen pada format penyusunan Laporan Keberlanjutan yang tercantum dalam buku Petunjuk Teknis bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah Terkait Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan di sektor pembiayaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Nadia (2024) dalam IDX News, terdapat 14 perusahaan di sektor pembiayaan yang terdaftar di BEI, yaitu PT PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Clipan Finance Indonesia Tbk, PT Mandala Multifinance Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Buana Finance Tbk, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, PT Woori Finance Indonesia Tbk, PT Danasupra Erapasific Tbk, PT Fuji Finance Tbk, PT Radana Bhaskara Finance Tbk, PT Pool Advista Finance Tbk, PT KDB Tifa Finance Tbk, dan PT Trust Finance Indonesia Tbk. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dimana seluruh populasi digunakan dalam penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan tahun 2023 yang telah dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan atau melalui Bursa Efek Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode skoring dengan cara menilai pada setiap elemen yang ada. Berikut sistem penilaian dalam penelitian ini .

1. Skor 0 : jika elemen tersebut tidak diungkapkan.
2. Skor 1 : jika elemen tersebut diungkapkan, tetapi tidak cukup lengkap.
3. Skor 2 : jika elemen tersebut diungkapkan secara lengkap.

Selanjutnya, setiap perusahaan akan menjumlahkan seluruh nilai pada setiap elemen sehingga dapat memperoleh tingkat kesesuaian Laporan Keberlanjutan. Peneliti juga akan mengidentifikasi elemen mana yang sering tidak diungkapkan atau diungkapkan kurang lengkap sebagai bahan evaluasi dari penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan menilai tingkat kesesuaian laporan dengan menggunakan persentase. Berikut merupakan justifikasi peneliti terhadap tingkat kesesuaian Laporan Keberlanjutan yang dibuat.

1. <60% : kategori rendah
2. 60-79% : kategori sedang
3. >80% : Kategori tinggi

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan terhadap 14 perusahaan di sektor pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun 2024. Alasan utama pemilihan objek penelitian kali ini adalah karena perusahaan sektor pembiayaan menjadi salah satu bagian dari

lembaga jasa keuangan yang diwajibkan oleh OJK untuk menyusun Laporan Keberlanjutan sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017. Seiring dengan terjadinya peningkatan kesadaran akan isu keberlanjutan, perusahaan sektor pembiayaan menjadi salah satu perusahaan yang digadang-gadang menjadi pelopor dalam mewujudkan *Green Financing* yang sejalan dengan prinsip lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dengan produk utamanya berupa pembiayaan kepada masyarakat luas, perusahaan sektor pembiayaan memiliki peran penting dalam rangka menuju pembangunan berkelanjutan. Setiap perusahaan yang menjadi objek penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setiap tahunnya, masing-masing perusahaan telah menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan dokumen laporan keberlanjutan sebagai data utama dan laporan tahunan sebagai data pendukung jika perusahaan belum memisahkan antara laporan keberlanjutan dan laporan tahunan. Perusahaan sektor pembiayaan yang telah memisahkan kedua laporan tersebut hanya 5 dari 14 perusahaan yang ada. Padahal pemisahan kedua laporan tersebut sangat memudahkan pemangku kepentingan dalam penggunaan laporan tersebut. Dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh secara mudah melalui situs resmi perusahaan atau melalui laporan tahunan di BEI. Peneliti menggunakan laporan keberlanjutan dan laporan tahunan 2023 karena masih terdapat beberapa perusahaan sektor pembiayaan yang belum menerbitkan laporan tahunan 2024. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan tingkat kesesuaian dokumen, peneliti menggunakan laporan keberlanjutan dan laporan tahunan 2023.

4.2 Hasil Penilaian Tingkat Kesesuaian

Penilaian tingkat kesesuaian Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan di sektor pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada elemen-elemen yang diatur dalam lampiran II POJK No. 51/POJK.03/2017 dan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh OJK tahun 2024. Penilaian dilakukan dengan metode skoring dengan ketentuan skor 0 untuk elemen yang diungkap, skor 1 untuk elemen yang diungkap secara tidak lengkap, dan skor 2 untuk elemen yang diungkap secara lengkap. Setiap perusahaan diuji dengan 8 elemen penyusunan Laporan Keberlanjutan dengan total skor setiap perusahaan berjumlah 16. Berikut hasil dari skoring yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1 Rekapitulasi Skor Tingkat Kesesuaian Laporan Keberlanjutan

| Perusahaan Sektor Pembiayaan | Strategi Keberlanjutan | Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan | Profil Singkat | Penjelasan Direksi | Tata Kelola Keberlanjutan | Kinerja Keberlanjutan | Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada) | Lembar Umpan Balik (Feedback) untuk Pembaca (jika ada) | TOTAL | Persentase Kesesuaian |
|---|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|-------|-----------------------|
| PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 81% |
| PT BFI Finance Indonesia Tbk (BRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 81% |
| PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 75% |
| PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 81% |
| PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 81% |
| PT Buana Finance Tbk (BBLD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 81% |
| PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (VRNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 81% |
| PT Woori Finance Indonesia Tbk (BPFI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 81% |
| PT Danasupra Erapasific Tbk (DER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 88% |
| PT Fuji Finance Tbk (FUJI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 63% |
| PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 81% |
| PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 75% |
| PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 88% |
| PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 81% |
| TOTAL | 28 | 15 | 28 | 27 | 28 | 25 | 4 | 24 | | |

Sumber: data diolah 2025, output Excel

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis data yang ada, peneliti menggunakan diagram batang untuk menggambarkan hasil dari penilaian tingkat kesesuaian Laporan Keberlanjutan yang dibuat oleh 14 perusahaan sektor pembiayaan.



Sumber: data diolah 2025, output Excel

Gambar 1 Diagram Batang Tingkat Kesesuaian Laporan Keberlanjutan

Berdasarkan hasil skoring yang dilakukan, dapat dilihat bahwa sebagian besar perusahaan sektor pembiayaan yang terdaftar di BEI telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan tingkat kesesuaian yang tinggi. Perusahaan di sektor pembiayaan yang dianalisis menunjukkan bahwa tidak ada yang masuk dalam kategori rendah ($\leq 60\%$) dalam tingkat kesesuaian penyusunan Laporan keberlanjutan. Diagram menunjukkan bahwa tiga perusahaan masuk dalam kategori sedang (60-79%) dan sebelas perusahaan dalam kategori tinggi ($\geq 80\%$).

4.3 Pembahasan Tingkat Kesesuaian

Berdasarkan hasil skoring yang telah dilakukan, 14 perusahaan di sektor pembiayaan memiliki tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017. Namun, masih banyak perusahaan yang menggabungkan antara Laporan Tahunan dengan Laporan Keberlanjutan. Perusahaan yang memisahkan antara kedua laporan ini hanya 5 perusahaan dari 14 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan dokumen laporan yang ada, PT Danasupra Erapasific Tbk dan PT KDB Tifa Finance Tbk menjadi dua perusahaan yang memiliki skoring tertinggi dalam kesesuaian pengungkapan Laporan Keberlanjutan. Berbanding terbalik dengan PT Fuji Finance Tbk, perusahaan ini mendapatkan skoring paling rendah yang hanya mendapatkan 63% tingkat kesesuaiannya. Meskipun mendapat skoring paling rendah, perusahaan ini masih dalam kategori sedang dalam tingkat kesesuaian pengungkapan Laporan Keberlanjutan.

Jika dilihat dari sisi elemen laporan, elemen profil singkat, penjelasan direksi, dan tata kelola keberlanjutan menjadi yang paling sering diungkapkan secara lengkap dibuktikan bahwa ketiga elemen tersebut mendapat skoring sempurna dari seluruh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan isi dari ketiga elemen cenderung bersifat formal dan mudah tersedia. Namun, berbanding terbalik dengan elemen ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan dan verifikasi oleh pihak independen yang hanya mendapat skoring berturut-turut 15 dan 4. Melihat dari dokumen yang ada, perusahaan sering kali tidak mencantumkan secara lengkap pada ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan bagian aspek ekonomi. Perusahaan juga masih sedikit yang melibatkan pihak ketiga untuk melakukan peninjauan kebenaran Laporan Keberlanjutan ini. Kondisi tersebut dikarenakan regulasi belum mewajibkan untuk setiap perusahaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka melakukan peninjauan kebenaran laporan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Untuk memperjelas tingkat kesesuaian laporan pada setiap elemen, berikut pembahasan tingkat kesesuaian pengungkapan laporan pada setiap elemen di 14 perusahaan sektor pembiayaan.

1. Strategi Keberlanjutan

Semua perusahaan di sektor pembiayaan yang diteliti telah mengungkapkan strategi keberlanjutan dalam laporan keberlanjutannya secara lengkap dan sesuai dengan regulasi dan format yang ada. Setiap perusahaan telah mengungkapkan berbagai strategi perusahaan yang berkelanjutan, termasuk penjelasan mengenai target jangka pendek dan panjang, pengelolaan risiko yang dilakukan, dan hasil yang ingin dicapai perusahaan khususnya sektor pembiayaan ini.

2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Elemen ini menjadi salah satu yang paling sedikit diterapkan secara sempurna oleh perusahaan di sektor pembiayaan. Dari 14 perusahaan yang diteliti, hanya 1 perusahaan yang telah mengungkapkan secara lengkap yaitu PT KDB Tifa Finance Tbk. Ketigabelas perusahaan ini pada dasarnya telah mengungkapkan ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan dalam dalam laporan mereka. Namun, terdapat beberapa yang masih belum diungkapkan khususnya pada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini, perusahaan kebanyakan belum mengungkapkan kuantitas produksi atau jasa yang dijual, produk atau jasa yang ramah lingkungan, dan keterlibatan pihak lokal. Padahal, ketiga informasi tersebut penting untuk menunjukkan komitmen terhadap keuangan berkelanjutan khususnya pada green financing.

3. Profil Singkat

Berdasarkan skoring yang telah dilakukan, seluruh perusahaan di sektor pembiayaan yang terdaftar dalam BEI sudah mengungkapkan profil singkat perusahaan secara lengkap. Semua perusahaan telah mengungkapkan informasi seperti visi, misi, nilai berkelanjutan, nama, alamat, nomor penghubung, email, skala usaha, penjelasan produk, keanggotaan pada asosiasi, dan perubahan perusahaan yang bersifat signifikan.

4. Penjelasan Direksi

Mayoritas laporan yang diterbitkan oleh perusahaan terdapat sambutan dari direksi, tetapi masih terdapat perusahaan yang belum menyertakan isu keberlanjutan dalam sambutan tersebut. Dari 14 perusahaan yang diteliti, terdapat satu perusahaan yang belum menyertakan secara lengkap isi sambutan direksi berupa isu keberlanjutan. Perusahaan yang dimaksud adalah PT Clipan Finance Indonesia Tbk, yang artinya direksi dari perusahaan tersebut belum sepenuhnya peduli terhadap isu keberlanjutan yang saat ini sedang digaungkan.

5. Tata Kelola Keberlanjutan

Seluruh perusahaan telah mengungkapkan tata kelola keberlanjutan secara lengkap. Dalam hal ini setiap perusahaan telah mengungkapkan secara lengkap mengenai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ada di perusahaan, penjelasan mengenai pengembangan kompetensi pegawai, pengelolaan risiko keterlibatan pemangku kepentingan dalam keuangan berkelanjutan, dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi perusahaan terkait isu keberlanjutan di masa depan.

6. Kinerja Keberlanjutan

Pengungkapan pada elemen kinerja keberlanjutan cukup baik dari semua perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Namun, masih terdapat beberapa perusahaan yang belum memenuhi secara lengkap isi dari elemen ini. PT Danasupra Erapasific Tbk, PT Fuji Finance Tbk, dan PT Pool Advista Finance Tbk menjadi tiga perusahaan yang belum secara lengkap mengungkapkan elemen ini. Ketiga perusahaan tersebut masih belum mengungkapkan secara lengkap pada aspek kinerja lingkungan hidup. Pada aspek kinerja ekonomi dan kinerja sosial, semua perusahaan telah mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017.

7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)

Secara keseluruhan, perusahaan di sektor pembiayaan masih belum dapat mengungkapkan dan kerja sama dengan pihak independen untuk melakukan pengujian terhadap Laporan Keberlanjutan. Berdasarkan hasil skoring, hanya terdapat dua perusahaan yang telah mengungkapkan secara lengkap dan jelas mengenai verifikasi tertulis dari pihak independen yaitu PT Woori Finance Indonesia Tbk dan PT Danasupra Erapasific Tbk. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh regulasi (POJK No. 51/POJK.03/2017) yang belum diwajibkan untuk seluruh perusahaan dalam bekerja

sama dan memverifikasi Laporan Keberlanjutan secara tertulis dari pihak independen. Padahal, verifikasi ini cukup penting untuk meyakinkan pengguna laporan bahwa laporan yang dibuat sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Lembar Umpan Balik untuk Pembaca (jika ada)

Meskipun belum diwajibkan dalam membuat lembar umpan balik untuk pembaca, perusahaan di sektor pembiayaan 86% sudah membuat lembar umpan balik ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hanya PT Woori Finance Indonesia Tbk dan PT Fuji Finance Tbk yang belum membuat dan mengungkapkan lembar umpan balik. Lembar umpan balik ini cukup penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam berjalannya perusahaan. Namun, elemen ini bukanlah elemen utama dan hanya sebagai tambahan dalam Laporan Keberlanjutan. Merujuk pada POJK No. 51/POJK.03/2017, OJK juga belum mewajibkan untuk setiap perusahaan dalam membuat lembar umpan balik untuk pembaca.

5. KESIMPULAN

Merujuk pada POJK No. 51/POJK.03/2017, secara umum perusahaan di sektor pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan tingkat kesesuaian cukup bagus. PT Danasupra Erapi Pacific Tbk dan PT KDB Tifa Finance Tbk menjadi dua perusahaan yang menempati posisi pertama dalam tingkat kesesuaian pengungkapan Laporan Keberlanjutan terhadap regulasi yang ada. Namun, secara keseluruhan perusahaan masih terdapat beberapa elemen yang belum diungkapkan secara lengkap, seperti pada elemen ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan dan verifikasi tertulis dari pihak independen. Kedua elemen tersebut menjadi elemen yang paling buruk tingkat kesesuaiannya terhadap regulasi yang ada.

Dalam rangka tercapainya green financing, pemerintah melalui OJK perlu menunjukkan perhatian yang lebih konkret terhadap implementasi pengungkapan Laporan Keberlanjutan. Peningkatan kualitas laporan ini tidak hanya untuk memenuhi regulasi yang ada, tetapi untuk menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mewujudkan prinsip keberlanjutan. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen green financing dan peran strategi perusahaan dalam mewujudkan transisi ekonomi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Riesmiyantiningsias, N., Abdurrachman, & Kusuma, A. B. (2022). Implementasi Akuntansi Keberlanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mencapai Sustainable Development (Studi Kasus Bank Kalsel). *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 188–199.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2024, September 11). *Diskusi Pembiayaan Hijau Indonesia International Sustainability Forum (ISF) “Pembiayaan Hijau yang Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan”*. <https://Csis.or.Id/News/Diskusi-Pembiayaan-Hijau-Indonesia-International-Sustainability-Forum-Isf-Pembiayaan-Hijau-Yang-Inklusif-Untuk-Pembangunan-Berkelanjutan/>.
- Dewi, I. P., & Pitriasari, P. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 11(1), 33–53.
- Farhana, S., & Adelina, Y. E. (2019). Relevansi Nilai Laporan Keberlanjutan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 615–628.

- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Fuadah, L. L., Yuliani, & Safitri, R. H. (2018). *Pengungkapan Sustainability Reporting di Indonesia* (1st ed.). Citrabooks Indonesia.
- Munandar, A., Triyana, E., Amin, R., Putri, R. S. E., & Rosmina. (2021). Analisis Program CSR dalam Sustainability Report berdasarkan GRI Standards. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 2727–2746.
- Nadia, K. (2024, February 22). *14 Perusahaan Multifinance yang Terdaftar di BEI, Market Cap Terbesar Rp19 Triliun*. <https://www.idxchannel.com/Market-News/14-Perusahaan-Multifinance-Yang-Terdaftar-Di-Bei-Market-Cap-Terbesar-Rp19-Triliun>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Petunjuk Teknis bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah Terkait Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik, ojk.go.id 1 (2017).
- Pratami, Y. (2019). Pengaruh Sustainability Reporting dan Institutional Ownership Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening. *VALUTA*, 5(2), 81–92.
- Setiani, M. A., & Sinaga, I. (2021). Penentuan Pengungkapan Sustainability Report Dengan GRI Standar pada Sektor Non Keuangan. *GEMA: Journal of Gentiaras Management and Accounting*, 13(1), 23–35.
- Siladjaja, M., Nugrahanti, T. P., & Madgalena, P. (2023). *Teori Akuntansi Positif: Sebuah Tinjauan pada Persepsi Berbasis Rational Decision Model terhadap Informasi Akuntansi Berkualitas*. Mega Press Nusantara.
- Susadi, M. N. Z., & Kholmi, M. (2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 129–138.
- Widodo, O. A. (2019). Praktek Pengungkapan Sustainability Report dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Journal Competency of Business*, 3(1), 51–64.